

8/7/2025

Rencana Strategis 2025 - 2029

Kecamatan Pasimasunggu

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029. Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Pasimasunggu ini berpedoman kepada Surat Edaran Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rencana Strategi Kecamatan Pasimasunggu pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Pasimasunggu di dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.

Pasimasunggu, Agustus 2025

Plt. Camat Pasimasunggu,

NUR AMIN, S.Sos.I.

Nip. 198409032011011014

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Landasan Hukum	2
3. Hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya	7
4. Maksud dan Tujuan.....	8
a. Maksud.....	8
b. Tujuan.....	8
5. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM.....	11
1. Gambaran Umum Kondisi Kecamatan Pasimasunggu	11
a. Aspek Geografis dan Demografi.....	11
b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	12
c. Aspek Daya Saing Daerah.....	13
d. Aspek Pelayanan Umum	13
2. Gambaran Keuangan Kecamatan Pasimasunggu.....	31
3. Permasalahan dan Isu Strategis.....	38
a. Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasimasunggu.....	38

b. Isu Strategis Kecamatan Pasimasunggu	43
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	48
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pasimasunggu	48
a. Visi dan Misi	48
b. Tujuan dan Sasaran	51
2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah. 53	
a. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah.....	53
b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....	59
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	63
1. Program Perangkat Daerah Kecamatan Pasimasunggu	63
a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah.....	63
b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	69
2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	105
a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	105
b. Target Penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)	107
BAB V PENUTUP	110

Daftar Tabel

- Tabel 2.1.1. Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pasimasunggu
- Tabel 2.1.2. Jarak ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten
- Tabel 2.1.3. Data PNS Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Sesuai dengan Tingkat Pendidikan
- Tabel 2.1.4. Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal
- Tabel 2.1.5. Tabel Data asset
- Tabel 2.1.6. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2025-2029 (TC.23)
- Tabel 2.2.1. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu tahun 2025-2029 (TC.24)
- Tabel 2.3.1. Identifikasi dan Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasimasunggu
- Tabel 2.3.2. Alokasi Anggaran
- Tabel 2.3.3. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas (Tabel TB.36)
- Tabel 2.3.4. Tingkat Eletivikasi Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2019
- Tabel 2.3.5. Banyaknya Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Desa/Kelurahan dan Jenisnya di Kecamatan Pasimasunggu, 2019
- Tabel 2.3.6. Pembobotan Isu isu Strategis
- Tabel 3.2.1. Tujuan , Sasaran, Strategis, dan Kebijakan
- Tabel 3.2.2. Tujuan, Sasaran dan Sasara Jangka Menengah Kecamatan Pasimasunggu

- Tabel 4.1.1. Program dan Kegiatan Investasi Pembangunan Kepulauan Selayar (Usulan)
- Tabel 4.1.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar
- Tabel 4.2.1. Indikator Kinerja Kecamatan Pasimasunggu 2025-2029

Daftar Gambar

Gambar 1.3.1 Hubungan Renstra Kecamatan Pasimasunggu dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pasimasunggu



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) SKPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu tahun 2025-2029 disusun yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Pasimasunggu didasarkan pada kondisi yang diinginkan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029, sebagai penjabaran dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025 - 2029.

Lebih jauh, Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (pada periode keempat) dan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013 - 2023. Sementara itu, sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Nasional, RPJMD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), disamping menelaah RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, serta RPJMD dan RTRW kabupaten lain yang berdekatan, agar terdapat keharmonisan dan keselarasan pembangunan antar wilayah dalam bingkai arah pembangunan provinsi dan arah pembangunan Nasional, serta arah kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Kesemua pendekatan tersebut sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2029, disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 19524 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Penetapan Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cita Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302).

33. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47).

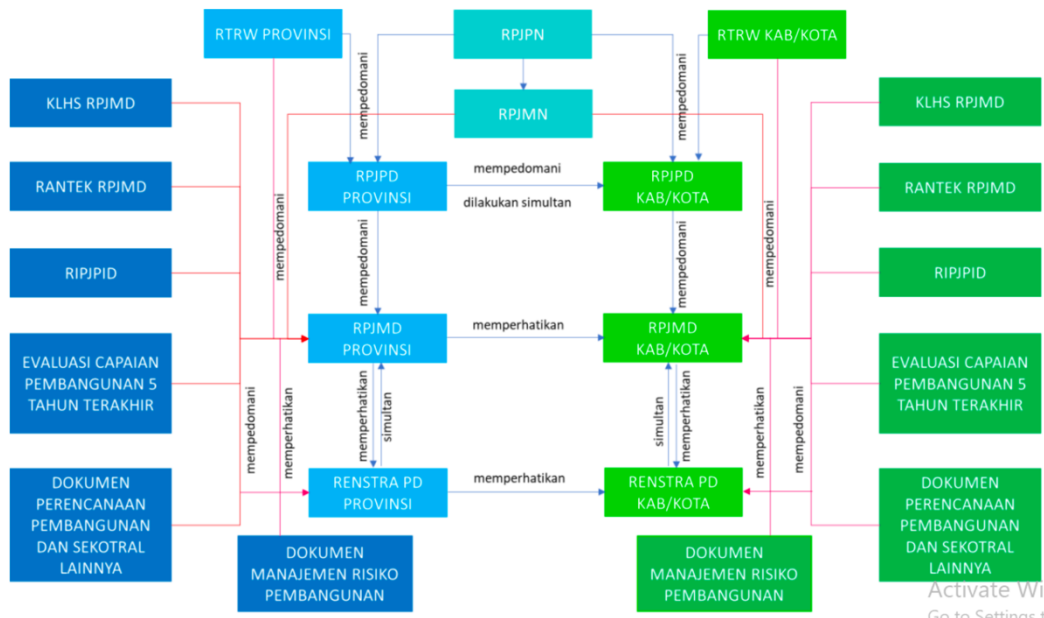
3. Hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya

RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dokumen RPJMD yang disusun selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berjangka waktu satu tahun. Dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam RPJMD ini dapat dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga diharapkan proses pembangunan terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah pelaksanaan Visi dan Misi Bupati terpilih yang disesuaikan dengan potensi, kondisi, masalah dan isu-isu strategis serta aspirasi masyarakat. RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai stakeholders termasuk pemerintah kecamatan, desa/ kelurahan.

Gambar 1.3.1.

Hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya



4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana strategis/Renstra Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2025 – 2029 disusun dengan maksud, untuk :

- 1) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh perangkat daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pencapaian visi misi Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025 – 2029
- 2) Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

b. Tujuan

- 1) Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;
- 2) Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
- 3) Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcome dan output yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi;
- 4) Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
- 5) Mengintegrasikan berbagai produk dokumen (contoh: RT, RW, Dokumen Potensi Daerah yang ada di desa, dll) ke dalam sebuah rencana strategis;
- 6) Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program & kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Pasimasunggu supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan;
- 7) Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal;

- 8) Meletakkan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai;
- 9) Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
- 10) Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

Selain itu Renstra ini juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan untuk menentukan arah program kegiatan Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

5. Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 7 Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya
4. Maksud dan tujuan; dan
5. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Aspek geografis dan demografi;
 - b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Aspek Daya Saing Daerah;
 - d. Aspek Pelayanan Umum.

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Kerjasama daerah;
 - c. Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten/kota; dan
 - d. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Penda.
2. Subbab Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020

hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.

3. Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pembangunan daerah; dan
 - b. Isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran paling sedikit memuat:
 - a. Visi dan Misi; dan
 - b. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan
 - b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Subbab Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
 - b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat :
 - a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
 - b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM

1. Gambaran Umum Kondisi Kecamatan Pasimasunggu

a. Aspek Geografis dan Demografi

Kecamatan Pasimassunggu terdiri dari 7 Desa dan memiliki luas wilayah sekitar 131,80 km². Desa dengan wilayah terluas di kecamatan tersebut adalah Desa Ma'Minasa dengan luas sekitar 34,06 km² dan Desa dengan wilayah terkecil adalah Desa Massungke dengan luas sekitar 16,33 km². Kecamatan Pasimassunggu berjarak kurang lebih 97 km dari Ibu Kota Kabupaten di Kecamatan Benteng.

Tabel 2.1.1
Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pasimassunggu

Desa	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
Tanamalala	18,5	14,04
Kembang Ragi	20,34	15,43
Labuang Pamajang	25,61	19,43
Maminasa	34,06	25,84
Bontosaile	16,96	12,87
Massungke	16,33	12,39
Teluk Kampe	-	-
Pasimasunggu	131,8	100

Tabel 2.1.2
Jarak ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten

Desa	Jarak ke Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten
Tanamalala	8	135
Kembang Ragi	1	125
Labuang Pamajang	5	130
Maminasa	9	97
Bontosaile	15	135
Massungke	3	130
Teluk Kampe	8	132

Jumlah penduduk di Kecamatan Pasimassunggu pada tahun 2023 adalah sebanyak 9.261 jiwa, dengan rincian 4.570 laki-laki dan 4.691 perempuan. Desa dengan penduduk terbanyak adalah Desa Kembang Ragi dengan persentase penduduk sebesar 29,99% dari total penduduk di kecamatan tersebut, atau sebanyak 2.777 jiwa. Sedangkan desa dengan penduduk paling sedikit adalah Desa Tanamalala dengan persentase penduduk sebesar 9,03% dari total penduduk di kecamatan tersebut, atau sebanyak 836 jiwa. Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Pasimassunggu pada tahun 2023 adalah sebesar 97,42, yang berarti dari setiap 100 jiwa penduduk perempuan akan terdapat 97 sampai 98 jiwa penduduk laki-laki.

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kecamatan Pasimassunggu pada tahun 2023 memiliki fasilitas pendidikan berupa 10 Taman Kanak-Kanak (TK), 10 Sekolah Dasar (SD), 5 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Untuk persebarannya, SD terdapat di setiap desa, SMP terdapat di 4 desa dan SMK terdapat di 1 desa. Sedangkan untuk keberadaan fasilitas kesehatan pada tahun 2023, terdapat 1 desa yang memiliki Puskesmas Rawat Inap. Berdasarkan indikator terkait perumahan dan lingkungan hidup di Kecamatan Pasimassunggu pada tahun 2021, menunjukkan sebagian besar sumber air minum keluarga di 7 desa adalah air sumur. Bahan bakar memasak sebagian besar keluarga di 7 desa menggunakan Elpiji 3kg.

Fasilitas tempat buang air besar sebagian besar keluarga di 6 desa adalah jamban sendiri dan di 1 desa adalah bukan jamban. Pada tahun 2021, seluruh desa di Kecamatan Pasimassunggu sudah dialiri listrik, dengan mayoritas listrik PLN.

c. Aspek Daya Saing Daerah

Berdasarkan indikator terkait pertanian tanaman hortikultura pada tahun 2023, produksi sayuran semusim terbanyak di Kecamatan Pasimassunggu adalah cabai rawit, dengan produksi sebanyak 40 kuintal yang dihasilkan dari luas panen seluas 5 hektar. Selain sayuran semusim, pada tahun 2023 di Kecamatan Pasimassunggu juga terdapat produksi tanaman biofarmaka dan tanaman buah-buahan tahunan. Untuk produksi tanaman biofarmaka terbanyak yang dihasilkan di Kecamatan Pasimassunggu adalah tanaman laos/lengkuas, dengan produksi sebanyak 90 kuintal yang dihasilkan dari luas panen seluas 90 hektar. Adapun untuk produksi buah-buahan tahunan terbanyak yang dihasilkan di Kecamatan Pasimassunggu adalah buah pisang, dengan produksi sebanyak 500 kuintal. Disamping itu terdapat produktifitas kegiatan persawahan yang signifikan yang dikenal dengan Beras Jamepa.

d. Aspek Pelayanan Umum

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasimassunggu mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan hal tersebut maka di bawah ini dijelaskan tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kecamatan Pasimassunggu :

1) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

Pemerintah Daerah. Untuk pelaksanaan tugasnya Camat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Kecamatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Camat meliputi :

- menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan

- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- melaksanakan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- menyusun laporan pelaksanaan Tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. SEKRETARIS

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
3. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
4. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

- menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
- melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- mengelola administrasi umum;
- melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- mengelola administrasi keuangan;
- melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparaturnya;
- melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pelaporan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
- g. melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
- h. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
- i. melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
- j. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- k. melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- m. mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;

- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- p. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan serta mengelola administrasi keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- g. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- i. menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
- j. melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;

- k. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
- l. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- m. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- n. menyusun neraca keuangan kecamatan;
- o. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- p. melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- q. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- r. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
- s. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- v. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- h. Melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- j. Melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- k. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- l. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
- g. Melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
- h. Melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. Memfasilitasi penegakan Peraturan daerah bersama PPNS;
- k. Melakukan pengamanan kebijakan Peraturan daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
- l. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- m. Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2016, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
- i. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;

- j. Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. Menyiapkan rekomendasi perijinan tertentu;
- l. Memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
- m. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
- n. Memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
- o. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
- p. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
- q. Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
- r. Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
- s. Mengumpulkan dan mengelola data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
- t. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- u. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
- v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan social.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- g. Melakukan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
- h. Mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
- i. Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- j. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

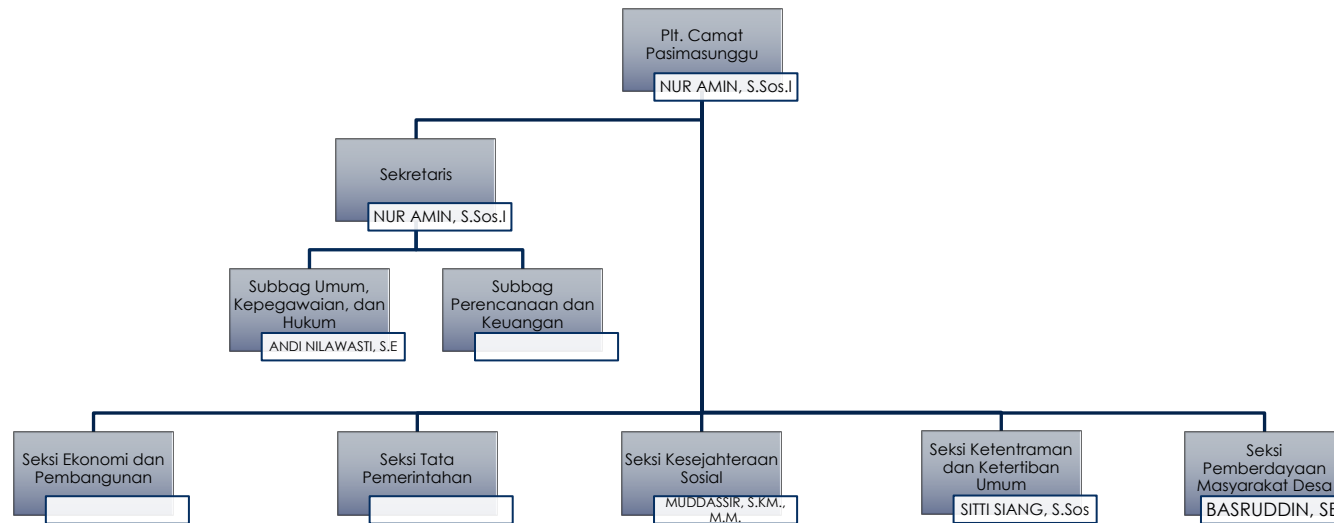
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
- i. Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olahraga dan seni budaya;
- j. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;

- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2.1.1. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pasimasunggu

2) Fungsi Kecamatan

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa atau Kekayaan Desa lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;
6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

3) Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Data PNS Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tingkat pendidikan, secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 2.1.3.

Data PNS Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Sesuai dengan Tingkat Pendidikan

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		PROSENTASE	
		PNS	CPNS	PNS	CPNS
1	S2	2	0	11,11%	0
2	S1	6	0	33,33 %	0
3	D3	0	0	0	0
4	SLTA	10	0	33,33 %	0
5	STP	0	0	0	0
6	SD	0	0	0	0
		18	0	100 %	0

Tingkat Pendidikan PNS di kecamatan pasimasunggu di dominasi oleh SLTA sebanyak 10 orang Strata Dua 2 orang dan Strata Satu sebanyak 6 orang.

Tabel 2.1.4.

Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal

No	Gol. Ruang	Tingkat Pendidikan Formal (orang)								JML
		S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	IV/a	2	-	-	-	-	-	-	-	2
4	III/d	-	3	-	-	-	-	-	-	3
5	III/c	-	1	-	-	-	1	-	-	2
6	III/b	--	2	-	-	-	-	-	-	2
7	III/a	-	-	-	-	-	1	-	-	1
8	II/d	-	-	-	-	-	2	-	-	2
9	II/c	-	-	-	-	-	4	-	-	4
10	II/b	-	-	-	-	-	1	-	-	1
11	II/a	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Jumlah	2	6	-	-	-	10	-	-	18

Tingkat Pendidikan terbagi dalam beberapa golongan dimulai dari Golongan II/a hingga Golongan IV/a

b. Asset/Modal

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Pasimasunggu meliputi gedung kantor dan perlengkapannya.

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Pasimasunggu disajikan dalam bentuk inventaris barang sesuai Permendagri No 17 TH 2007 antara lain :

Tabel 2.1.5.
Tabel Data Asset

No	Uraian	Keadaan			Jumlah	Keterangan
		B	RR	RB		
1	Tanah Lokasi Perkantoran				1 Unit	Kantor dan rumah dinas
2	Kendaraan roda 2 (Motor)	2	4		6 Unit	Kantor Camat dan sekretariat Kecamatan
3	Kendaraan Roda 4 (Mobil)	1			1 Unit	Sekretariat Kecamatan di Benteng Selayar
4	Perkakas Bengkel Lain				-	
5	Brand Kas				-	
6	Alat Kantor Lainnya				1	
7	Lemari Kayu				2	
8	Meja Rapat	2			2	
9	Meja Makan				1	
10	Kursi Putar	5	1	2	8	
11	Meja Komputer	1	-	-	1	
12	Rak Buku	2	-	-	2	
13	Kursi Plastik			50	150	
14	Papan Pengumuman	1	-	-	1	
14	Kursi Kerja				33	
15	Gordyn				1	
16	Jam Mekanis				-	
17	Ac Unit				-	
18	Kipas Angin	6	-	-	6	
19	Kompor Gas	2	-	-	2	
20	Alat Dapur Lainnya				1	
21	Tabung Gas	2	-	-	2	
22	Televisi	1	-	1	2	
23	Mimbar/Podium	1	-	-	1	
24	P.c. Unit Komputer Fc	1	-	1	2	
24	Laptop	2	1	1	4	
25	Printer	1	1		2	
26	Scanner				-	
27	Meja Kerja				10	
28	Lemari Arsip				7	
29	Camera Elektronik	1	-	-	1	
30	Mkicrophone	1	-	-	1	
31	Sound System				4	

32	Tenda Terowongan	6	-	-	6	
33	Tondon Air	1	-	-	1	
34	CCTV				-	

2. Gambaran Keuangan Kecamatan Pasimasunggu

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan mengamati kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Pasimasunggu berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 09 Tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Pasimasunggu periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan Pasimasunggu dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Kecamatan Pasimasunggu ini mengacu pada hasil kerja .

Tabel 2.1.6.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2020-2024 (IKK)

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Terget Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan																
	❖ Jumlah RW tertib administrasi		Persentase tertib administrasi		1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100 %	100 %
	❖ Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun (profil kecamatan dan tipologi)		Persentase materi lingkup pemerintahan		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	❖ Pembinaan Desa (Desa terbaik)		Persentase Pimanaan Desa		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	0	0	0	1	1	0	0	0	100 %	100 %
	❖ SOP bidang pemerintahan yang tersusun		Jumlah SOP yang tersusun		1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja		Peningkatan Kapasitas Organisasi																
	❖ SOP bidang administrasi umum , kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan		Jumlah SOP bidang Administrasi Umum		1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	❖ Analisis Tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun		Jumlah dokumen analisis	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3	3	3	3	3	3	100 %	100 %	100 %	100 %	30%
	❖ % PNS yang mendapat hukuman disiplin		Prosentase PNS yang mendapat hukuman disiplin	0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	❖ Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam setahun		Prosentase kehadiran PNS	90 %	80 %	90 %	95 %	95 %	80 %	80 %	80 %	85 %	85 %	88.8 %	100 %	88.8 %	89.4 %	89.4 %	89.4 %
3	Meingkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat																		
	❖ % wajib KTP yang memiliki KTP			90 %	91 %	92 %	93 %	94 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	98.9 %	97.8 %	96.7 %	95.7 %	95.7 %
	❖ Indeks kualitas masyarakat																		-
	❖ Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang tersusun			1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat																		
	❖ Terbinanya kader POSYANDU dan PKK			2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2	2	2	2	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	❖ % sekolah yang menerapkan UKS			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	❖ Jumlah insiden akibat konflik agama			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	❖ Jumlah rumah ibadah yang berfasilitas mendapat bantuan			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	❖ SOP lingkup pendidikan yang tersusun			-	-	-	-	-											100 %
5	Meningkatkan aktifitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, dan BKM binaan																		

	❖ Jumlah UKM yang aktif				3 unit	-3 unit	-3 unit	1 unit	3 unit	0	0	0	1	2	0	0	0	100 %	66.6 7 %
	❖ Jumlah Koperasi aktif				2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	❖ SOP bidang EKBANG tersusun				1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP										100 %
	❖ Jumlah program kemitraan yang terjalin				1 prog	1 prog	1 prog	1 prog	1 prog	0	0	0	1	1	0	0	0	100 %	100 %
6	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara, dan tanah, dan pengelolaan sampah dengan 3 R (reduce, Reuse, Recycle)																		
	❖ Jumlah pohon yang ditanam di kecamatan																		
	❖ Jumlah kawasan konservasi laut kecamatan (KKLK) yang terkelola																		
	❖ SOP bidang lingkungan hidup yang tersusun				1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat																		
	❖ % penurunan pelanggaran K3				20 %	20 %	10 %	10 %	10 %	20	20	10	10	10	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	❖ % penurunan illegal logging				80 %	85 %	90 %	90 %	90 %	80	85	90	90	90	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	❖ % penurunan illegal fishing				30 %	30 %	20 %	20 %	20 %	20	20	10	10	10	66.6 7 %	66.6 7 %	50 %	50 %	50%
	❖ SOP bidang ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun				1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi, kecamatan pasimasunggu tidak menemukan kesenjangan dalam pelayanan yang signifikan, namun dalam merealisasikan jumlah RW tertib administrasi yang telah ditargetkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 baru dapat direalisasikan pada tahun 2019 dan 2020.

Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja tidak terdapat kesenjangan sehingga mayoritas target telah terealisasi. Terdapat peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terdapat masyarakat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

Kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat tidak terdapat kesenjangan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

Kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara, dan tanah, dan pengelolaan sampah dengan 3 R (reduce, Reuse, Recycle) hanya terlaksana pembuatan SOP.

Kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat dapat terlaksana dari tahun ke tahun tanpa adanya kesenjangan.

Tabel 2.1.7.

Indikator Kinerja Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar 2020-2024 (mengacu pada tujuan dan sasaran renstra)

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	70%	72%	75%	80%	85%	85%
	Nilai SAKIP Kecamatan	60.2	60.2	65.2	70.2	75.5	80.0	80.0
	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	% Kebijakan Pembangunan seluruh urusan yang sinkron, harmonis, selaras maupun antar tingkat pemerintahan diwilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	%Penduduk yang mampu mengakses layanan seluruh urusan pemerintahan secara mudah, layak, dan terjangkau di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.1.8.
Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu tahun 2020-2024 (TC.24)

Uraian	Anggaran Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah																	
1. Belanja Tidak Langsung																	
a. Belanja Pegawai	5.650.100	5.655.100	6.273.900	5.418.553	1.821.700	5.306.852	5.275.828	5.897.705	5.306.335	1.669.826	93,92	93,29	94,00	97,93	91,66	-20%	-21%
b. Belanja Hibah																	
2. Belanja Langsung																	
a. Belanja Pegawai																	
b. Belanja barang dan Jasa	763.000	800.000	558.760	569.708	418.301	758.739	794.408	551.010	564.541	415.488	99,44	99,30	98,61	99,09	99,33	-11%	-11%
c. Belanja Modal	30.000	150.000	10.000	37.500	15.000	30.000	143.148	10.000	37.500	15.000	100	95,43	100	100	100	-13%	-13%

Terjadi dinamika proyeksi penganggaran dari tahun ketahun dan tidak terdapat pertumbuhan yang signifikan dalam pelaksanaannya.

3. Permasalahan dan Isu Strategis

a. Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan Pasimasunggu

Kecamatan Pasimasunggu yang merupakan kecamatan kepulauan dengan wilayah perairan yang cukup luas dimana terdapat 1 desa yang terletak di 1 pulau yang terpisah dengan kondisi perairan yang sangat tergantung pada kondisi cuaca, dimana hal ini menjadi kendala yang cukup berarti ditambah dengan kendala telekomunikasi yang tidak tercakup sinyal GSM. Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal optimalisasi pelayanan kepada masyarakat membutuhkan upaya yang maksimal dan sungguh-sungguh agar pelayanan yang diberikan tersebut dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat secara menyeluruh dengan kualitas pelayanan prima yang optimal.

Tabel 2.3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Masih lemahnya koordinasi dengan Desa/Kelurahan tentang Kebijakan Pemerintah Daerah	Kebijakan dan arah pembangunan Pemerintah Daerah yang belum tersampaikan dengan baik dan belum dipahami secara mendasar	Desa tidak bertanggung-jawab secara langsung ke Camat
			Belum maksimal koordinasi dalam bentuk rapat yang membahas arah kebijakan pembangunan daerah.
		Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal	Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur
			Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
	Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang limpahkan/diberikan		
2	Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor	keterbatasan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk	Keterbatasan jumlah pegawai untuk memenuhi rasio pelayanan yang ideal

	kecamatan Desa dan kelurahan sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal	kebutuhan peningkatan pelayanan masyarakat	Saran pelayanan yang belum optimal dan cenderung masih konvensional sehingga memerlukan waktu pelayanan yang lebih lama
3	Belum Optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah	Tingkat pendidikan dan ekonomi	Pembangunan yang masih menjadikan masyarakat sebagai obyek (fisik) yang seharusnya perimbangan sebagai subyek (pemberdayaan) yang ideal
			Hasil pebangunann yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun keberdayaan masyarakat untuk meningkatkan tingkat sosial dan ekonomi
		Optimalisasi bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat dimana - Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	Data yang belum sempurna dan terkesan seadanya dan terkesan keperpihakan dalam penyaluran dan pemanfaat bantuan yang disalurkan.
			Belum optimalnya penyaluran rastra, PKH, bantuan keagamaan kepada masyarakat desa
			Sosialisasi bahwa tidak sepatasnya terus-menerus merima bantuan.
Usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten yang belum terakomodir dengan seksama	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan		
	Tingkat keterserapan usulan yang prioritas di desa ke dalam prioritas anggaran kegiatan		
4	Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi masyarakat dan pemerintah Desa/kelurahan dan kecamatan	Peran Lembaga Kemasyarakatan yang belum dipandang sebagai suatu institusi pernting	<p>Pembinaan secara berkelanjutan yang masih sangat perlu ditingkatkan</p> <p>Keberadaan lembaga masih berupa serimonial pelengkap hanya saat ada kepentingan sesaat saja</p>

Disimpulkan beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu dalam penyeleng garaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu. Peta kendala-kendala tersebut, sebagai berikut :

1. Sumber daya Aparatur sebagai instrument utama pelayanan masyarakat relative belum tersedia memadai.

Sebagaimana yang dipaparkan secara umum di Bab sebelumnya perihal gambaran pelayanan Kecamatan Pasimasunggu, bahwa ketersediaan SDM Aparatur yang tidak memadai. Dengan kondisi geografis kepulauan dengan jumlah penduduk sebanyak 8.719 jiwa, 2.241 KK tentunya membutuhkan presentase ketersediaan SDM Aparatur yang ideal.

Kondisi SDM Aparatur di Kantor Kecamatan Pasimasunggu saat ini sebanyak 18 PNS dan 15 PTT dengan beban tugas yang cukup berat menjadi permasalahan tersendiri dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu.

2. Kualitas koordinasi lintas sektor instansi pemerintah yang relatif kurang

Dampak dari keterbatasan ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan Pasimasunggu adalah pada kualitas koordinasi antar sektor pemerintah yang relative kurang. Hal ini tercermin dari kinerja beberapa urusan pemerintah yang tidak optimal, antara lain : pendidikan, kesehatan, energy dan sumber mineral, kelautan dan perikanan, pertanian, perhubungan, terutama pada subsektor telekomunikasi yang sangat terbatas jika dibandingkan dengan kecamatan di wilayah perairan apalagi jika dibandingkan dengan kecamatan di daratan pulau utama.

3. Alokasi anggaran yang belum ideal

Dibandingkan dengan beban tugas dan luas wilayah kerja yang ada di Kecamatan Pasimasunggu, alokasi anggaran yang selama ini dikelola Kecamatan Pasimasunggu relatif tidak ideal.

Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.3.2
Alokasi Anggaran

Tahun	Alokasi Anggaran	%
2015	911,669,500	99.85%
2016	793,800,000	99.46%
2017	950,000,000	98.69%
2018	666,560,000	89.75%
2019	607,208,000	99.15%
2020	569.688,296	99.51%

4. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan yang masih relatif kecil

Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dapat dapat berdayaguna dan berhasilguna, apabila mendapat dukungan dan partisipasi aktif dan segenap komponen lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam memberikan partisipasinya pada setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Pasimasunggu, dapat disimpulkan bahwa kesadaran partisipatif masyarakat masih relative rendah. Hal ini disebabkan antara lain : tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, dan beban ekonomi yang dihadapi masyarakat dirasakan cukup berat, sehingga untuk meluangkan waktu dalam rangka terlibat dalam berbagai aktifitas kegiatan pemerintahan dan pembangunan sangat sulit.

Tabel 2.3.3.
Identifikasi dan Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kecamatan
Pasimasunggu (Tabel T-B.36)

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interperstasi: Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi			
	❖ Jumlah RW tertib administrasi	=	Target RW hanya 1	Pembinaan yang berkelanjutan dan terfokus
	❖ Data dan materi lingkup pemerintahan yang disusun (profil kecamatan dan tipologi)	=		Data profil yang sudah tersedia sebelumnya
	❖ Pembinaan Desa (Desa terbaik)	= (40 rasio 5 thn)		
	❖ SOP bidang pemerintahan yang disusun			SOP yang sudah tersedia sebelumnya
2	Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja			
	❖ SOP bidang administrasi umum, kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan	=		SOP yang sudah tersedia sebelumnya
	❖ Analisis Tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun	=		Dokumen yang sudah tersedia sebelumnya
	❖ % PNS yang mendapat hukuman disiplin	=		Pembinaan dilakukan dengan cara humanis dan konstruktif
	❖ Rata-rata tingkat kehairan PNS dalam setahun	89.47		Pembinaan dilakukan dengan cara humanis dan konstruktif
3	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat			
	❖ % wajib KTP yang memiliki KTP	95.74	Jarak ke dinas teknis	Sosialisasi berkelanjutan dari aparatur desa
	❖ Indeks kualitas masyarakat			
	❖ Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang disusun	=		SOP yang sudah tersedia sebelumnya
4	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat			
	❖ Terbinanya kader POSYANDU dan PKK	=		Sosialisasi berkelanjutan dari aparatur desa dan petugas Posyandu
	❖ % sekolah yang menerapkan UKS	=		Menjadi prioritas di sekolah
	❖ Jumlah insiden akibat konflik agama	=		Sosialisasi berkelanjutan dari semua pihak yang berkepentingan
	❖ Jumlah rumah ibadah yang berfasilitas mendapat bantuan	=	Ketersediaan pendanaan	Sosialisasi berkelanjutan dari aparatur desa
	❖ SOP lingkup pendidikan yang			

	tersusun			
5	Meningkatkan aktifitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, dan BKM binaan			
	❖ Jumlah UKM yang aktif	66.66 (33.34 ratio 5 thn)	Kegiatan pelatihan yagn sangat terbatas	Potensi sumber daya alam yang tersedia
	❖ Jumlah Koperasi aktif	0		
	❖ SOP bidang EKBANG tersusun	=		SOP yang sudah tersedia sebelumnya
	❖ Jumlah program kemitraan yang terjalin	= (40 ratio 5 thn)	Akses informasi terbatas karena keterbatasan jarak	Dukungan pemerintah desa dalam membangun UKM di desanya
6	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara, dan tanah, dan pengelolaan sampah dengan 3 R (reduce, Reuse, Recycle)			
	❖ Jumlah pohon yang ditanam di kecamatan	0	Keterbatasa lahan	
	❖ Jumlah kawasan konservasi laut kecamatan (KKLK) yang terkelola	0	Keterbatasan lahan	
	❖ SOP bidang lingkungan hidup yang tersusun	=		SOP yang sudah tersedia sebelumnya
7	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat			
	❖ % penurunan pelanggaran K3	=	Tingkat kesadaran hukum yang masih relatif kurang	Sosialisasi berkelanjutan dari pihak terkait
	❖ % penurunan illegal logging	=	Tingkat pemahaman dan keterbatasan mata pencaharian yang relatif rendah	Sosialisasi berkelanjutan dari pihak terkait
	❖ % penurunan illegal fishing	50	Tingkat pemahaman dan keterbatasan mata pencaharian yang relatif rendah	Sosialisasi berkelanjutan dari pihak terkait
	❖ SOP bidang ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun			SOP yang sudah tersedia sebelumnya

b. Isu Strategis Kecamatan Pasimasunggu

1) Tantangan

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, dapat diuraikan beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Pasimasunggu dalam penyelenggaraan pemerintah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

a. Infrastruktur Kelistrikan Yang Belum Memadai

Pemenuhan energy listrik bagi kebutuhan rumah tangga di Kecamatan Pasimasunggu sudah dilakukan melalui listrik yang

disediakan pemerintah namun daya yang masih terbatas jangkauan dan waktu nyalanya. Tingkat elektrifikasi di Kecamatan Pasimasunggu masih rendah pada posisi 28,72% dari jumlah rumah tangga yang ada.

Tabel 2.3.4
Tingkat Eletivikasi Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2019

Desa/Kelurahan	Pegguna Listrik			Bukan Pengguna Listrik
	PLN	Non PLN	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kembangragi	734	-	734	-
2. Ma'minasa	-	237	237	-
3. Tanamalala	-	245	245	-
4. Labuang Pamajang	370	-	370	-
5. Bontosaile	-	232	232	-
6. Massungke	-	285	285	-
7. Telukkampe	-	312	312	-
Pasimasunggu	1.104	1.311	2.415	-

Tabel 2.6. Tingkat Eletivikasi Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2019

b. Terbatasnya Pelayanan Sarana Transportasi Antar Pulau

Sebagai kecamatan yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 8 buah pulau, ketersediaan sarana transportasi antar pulau merupakan suatu keniscayaan. Selama ini, sebagai akibat terbatasnya sarana transportasi antar pulau, khususnya dari dan ke ibukota kabupaten, menyebabkan apar pemerintah yang bertugas di Kecamatan Pasimasunggu namun berdomisili dari daratan Selayar terkadang mengakibatkan lalai menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu, perlu ditingkatkan ketersediaan sarana transportasi dari pulau guna

mendukung aksesibilitas arus barang, jasa dan penumpang dari dan ke wilayah Kecamatan Pasimasunggu.

c. Sistem Pertanian Masyarakat Yang Masih Relative Bersifat Subsistem

Kegiatan perekonomian yang berbasis hanya pada pemenuhan kebutuhan keluarga mendominasi kegiatan pertanian di Pasimasunggu. Hal ini berimbas pada pertanian yang menggerakkan perekonomian Kecamatan Pasimasunggu secara umum. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan transportasi untuk pemasaran hasil pertanian. Moda transportasi yang ada dengan moda transportasi rakyat yang relative tradisional dengan biaya ekonomi yang relatif mahal berimbas langsung pada pendapatan masyarakat dengan margin keuntungan yang juga relative kecil.

d. Kualitas Ketenagakerjaan Yang Relative Rendah

Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia dan tingkat pendidikan pencari kerja yang berbanding lurus dengan kualitas tenaga kerja yang rendah. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang relative rendah. Juga dipengaruhi oleh tingkat ekonomi yang masih relative rendah.

e. Pengelolaan Potensi Sumberdaya Alam Baik Darat Maupun Laut Belum Optimal

Sebagai kecamatan dengan wilayah kepulauan dimana perairan menjadi dominan dengan potensi yang sangat besar. Kekurangan armada penangkapan ikan yang itupun yang ada masih bersifat tradisional ditambah lagi jangkauan pemasaran dengan armada pengangkutan hasil perikanan yang terbatas menyebabkan potensi perikanan dan kelautan menjadi hal yang kurang menarik bagi masyarakat Kecamatan Pasimasunggu.

Potensi pertanian pun yang merupakan potensi sumberdaya alam di darat juga tidak optimal dalam pengelolaannya. Seperti dijelaskan

sebelumnya bahwa transportasi dan pengelolaan subsistem yang hanya menjadikan pertanian untuk kebutuhan pemenuhan keluarga saja.

Tabel 2.3.5.

Banyaknya Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Desa/Kelurahan dan Jenisnya di Kecamatan Pasimasunggu, 2019

Desa		kelompok Pertokoan	Pasar dengan Bangunan Permanen	Pasar dengan Bangunan Semi	Pasar Tanpa Bangunan
1		2	3	4	5
1	Kembangragi	-	1	-	-
2	Ma'minasa	-	1	-	-
3	Tanamalala	-	-	-	-
4	Labuang Pamajang	-	-	-	-
5	Bontosaille	-	-	-	-
6	Massungke	-	-	-	-
7.	Telukkampe				
Pasimasunggu		-	2	-	-

Tabel 2.3.6.

Pembobotan isu-isu strategis

No.	Kriteria	Bobot
1	Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam membangun dan mengembangkan wilayah kepulauan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata sesuai dengan visi misi yang berfokus pada kemaritiman.	30
2	Nilai ekonomis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang relative tinggi di pasar regional, nasional, maupun global.	25
3	Potensi investasi yang relative besar dan prospektif terutama di sektor perdagangan (distriusi barang), perikanan dan pariwisata (bahari).	25
4	Letak wilayah di tenggara yang berbatas langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini bisa dikembangkan menjadi gerbang perdagangan barang dan jasa.	20
		100

Tabel 2.3.7.
Isu-isu strategis Kecamatan Pasimasunggu

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan kecamatan Pasimasunggu	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Kurangnya Kualitas dan Ketepatan Layanan	Tata Kelola Pemerintahan		Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pasimasunggu

a. Visi dan Misi

Visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar terpilih hasil Pemilihan Kepala daerah serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 dan terlantik pada tanggal 20 Februari 2025. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 adalah :

“Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”.

Pernyataan visi mengandung makna, yaitu :

Bersama artinya bentuk sinergitas diantara penta helix pemangku kepentingan (Akademisi, Swasta, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Media) yang terbangun dari peran yang setara dan selaras dalam satu kesatuan yang utuh, solid, dan menjunjung tinggi sifat toleransi untuk mengelola sumber daya alam, dalam rangka membangun perekonomian daerah, dengan prinsip pembangunan :

1. Meminimalkan kesenjangan ekonomi antara Selayar daratan dengan Selayar kepulauan
2. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang diterima oleh penduduk Pulau Selayar, sama dengan yang diterima oleh penduduk kepulauan
3. Pelayanan sosial yang diterima oleh penduduk Pulau Selayar, sama dengan yang diterima oleh penduduk kepulauan
4. Tingkat kesejahteraan penduduk Pulau Selayar, sama dengan Tingkat kesejahteraan penduduk kepulauan
5. Infrastruktur dibangun sesuai kebutuhan pulaunya
6. Ketersediaan pangan (bahan makanan) di Pulau Selayar, sama dengan yang ada di kepulauan
7. Mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat yang berkeadilan, untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan.

Membawa artinya pergerakan perilaku ekonomi sebagai daerah konsumen menjadi daerah produsen dengan peningkatan kualitas manajemen dan teknologi industri menuju masyarakat maju dan sejahtera.

Maju artinya kemampuan daerah melakukan perubahan paradigma pembangunan dengan menerapkan digitalisasi dan teknologi industri pada penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian dengan hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM dan huluisasi pada ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal.

Sejahtera artinya hasil pembangunan yang dicapai telah menciptakan lapangan usaha baru dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meminimalkan pengangguran dan kemiskinan, serta memberi dampak pada meningkatnya daya beli masyarakat”,

Visi merupakan gambaran kondisi daerah yang diharapkan pada tahun 2029 yaitu :

1. Kesempatan berusaha terbuka;
2. Lapangan kerja tersedia;
3. Angka pengangguran menurun;
4. Angka kemiskinan menurun;
5. Daya beli masyarakat meningkat;
6. Ketentraman dan kedamaian masyarakat yang penuh toleransi; dan
7. Pengelolaan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029, ditetapkan Misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja melalui ”Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur” yang menghasilkan ASN kreatif, inovatif, dan kolaboratif serta mampu mengikuti perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi digital, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menciptakan inovasi daerah.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja

melalui “Program Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat” yang menghasilkan SDM mandiri, tenaga kerja siap pakai, kreatif, dan mampu berinovasi untuk menciptakan lapangan usaha, dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan

3. Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah, untuk membentuk perubahan paradigma pembangunan ekonomi berupa kebiasaan menjual bahan mentah, menjadi kebiasaan menjual produk akhir yang berkualitas melalui “Program Hilirisasi Sumber Daya Alam” atau petik-olah-jual dengan teknologi industri, dalam rangka membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja sebanyak mungkin.; dan untuk meningkatkan produk daerah melalui “Program Pembinaan Manajemen Lembaga Usaha dan Masyarakat” dengan digitalisasi pemasaran bagi UMKM, BUMDes, Koperasi, dan/atau BUMD, dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah;
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan, untuk mengembangkan perekonomian masyarakat perdesaan dengan melakukan pembinaan pengelolaan potensi sumber daya unggulan, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) pada masing masing desa melalui “Program Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Masyarakat Perdesaan”, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat dan pendapatan daerah
5. Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah, untuk pemerataan Pembangunan infrastruktur perhubungan secara proporsional sesuai kebutuhan dan terkoneksi di seluruh wilayah kabupaten melalui “Program Pengembangan Prasarana Transportasi” dengan melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan fisik prasarana, dalam rangka membangun kesatuan ekonomi antarpulau dan kesatuan wilayah kabupaten.
6. Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama, untuk menyiapkan fasilitas kegiatan kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan dengan melakukan pembinaan kelembagaan sosial, budaya, dan agama, serta pembinaan masyarakat penyandang masalah sosial.

7. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, untuk mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menjaga, melestarikan dan memelihara lingkungan hidup dimulai dengan penyehatan lingkungan permukiman, pengelolaan limbah, serta meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan melalui program “Pembinaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup”, dalam rangka mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Selayar tahun 2025-2029 berdasarkan misi sebagai berikut :

Misi 1 Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif

Tujuan 1 (T1) : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

Sasaran 1 (S1) : Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif

Misi 2 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Tujuan 2 (T2) : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat

Sasaran 2 (S2) : Meningkatnya mutu dan akses pendidikan

Sasaran 3 (S3) : Meningkatkan mutu dan akses kesehatan

Sasaran 4 (S4) : Menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan

Sasaran 5 (S5) : Meningkatnya kualitas generasi muda, keluarga dan kesetaraan gender

Misi 3 Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah

Tujuan 3 (T3) : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah

Sasaran 6 (S6) : Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah

Sasaran 7 (S7) : Meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan

Sasaran 8 (S8) : Percepatan hilirisasi dan industri sumberdaya alam berorientasi ekspor

Sasaran 9 (S9) : Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah

Sasaran 10 (S10) : Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif

Sasaran 11 (S11) : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas

Misi 4 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan

Tujuan 4 (T4) : Meningkatkan kemandirian perdesaan

Sasaran 12 (S12) : Meningkatnya kemandirian pangan berbasis perdesaan yang berkualitas dan berkelanjutan

Sasaran 13 (S13) : Meningkatnya sumberdaya manusia yang mandiri, kreatif dan inovatif

Sasaran 14 (S14) : Meningkatnya status desa

Misi 5 Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Tujuan 5 (T5) : Meningkatkan konektivitas wilayah

Sasaran 15 (S15) : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata

Misi 6 Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama

Tujuan 6 (T6) : Meningkatkan kerukunan antar kelompok sosial, budaya dan agama

Sasaran 16 (S16) : Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila dan kualitas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat

Sasaran 17 (S17) : Meningkatkan kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju

Tujuan 7 (T7) : Menurunkan penyalagunaan narkoba di lingkungan masyarakat

Sasaran 18 (S18) : Meningkatnya pembinaan dan pencegahan penyalagunaan narkoba di lingkungan masyarakat

Misi 7 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Tujuan 8 (T8) : Mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan dan mitigasi bencana

Sasaran 19 (S19) : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran 20 (S20) : Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

a. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Pasimasunggu adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan Kecamatan Pasimasunggu diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD 2025 - 2029.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Pasimasunggu menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pasimasunggu.

1) Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

2) Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

- a) Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
- b) Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
- c) Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas Kecamatan Pasimasunggu yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih; dan

- d) Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tupoksi Kecamatan Pasimasunggu agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Tabel 3.2.1.
Tujuan , Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

VISI : Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera			
MISI 1: Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif	Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
		Meningkatkan SDM Aparatur, efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran	Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui Diklat
		Meningkatkan inovasi serta pemamfaatan teknologi dalam pelayanan;	Melakukan Inovasi dan Aksi perubahan dalam pelayanan
Misi 4 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan			
Meningkatkan kemandirian perdesaan	Meningkatnya kemandirian pangan berbasis perdesaan yang berkualitas dan berkelanjutan	Mengoptimalkan koordinasi stakeholder dalam rangka peningkatan fungsi kelembagaan dan produktifitas masyarakat perdesaan	Pelaksanaan bimbingan teknis fungsi kelembagaan dalam peningkatan perekonomian desa

	Meningkatnya sumberdaya manusia yang mandiri, kreatif dan inovatif	Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan Desa dalam pembangunan	Pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan Kualitas SDM Kepala desa dan Perangkat Desa
	Meningkatnya status desa	Meningkatkan Indikator Status Desa	Melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan status desa
Misi 6 Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama			
Meningkatkan kerukunan antar kelompok sosial, budaya dan agama	Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila dan kualitas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan wawasan kebangsaan, Persatuan dan kesatuan bangsa, Kerukunan antar suku dan intrasuku, Umat beragama, ras dan Golongan lainnya	Peningkatan wawasan kebangsaan Masyarakat melalui Pembinaan, Bimtek dan Sosialisasi
	Meningkatkan kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju	Meningkatkan peran lembaga keagamaan dalam pembangunan manusia	Peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan.

Tabel 3.2.2.
Tujuan, Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pasimasunggu

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan Pasimasunggu	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Pasimasunggu			55	64	68	73	76
			Meningkatnya Nilai Sakip Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan Pasimasunggu	60	65	70	75	80
			Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan Kecamatan Pasimasunggu sesuai SAP	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasimasunggu	70%	72.50 %	75 %	80 %	85 %
2	Meningkatkan kemandirian perdesaan	Indeks Desa Membangun Kecamatan Pasimasunggu			0,6300	0,6650	0,7000	0,7150	0,7300
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Peningkatan Fungsi Lembaga Desa yang	63 %	66 %	70 %	71 %	73 %

				Dikoordinasikan					
			Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa	Persentase Urusan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial di Kecamatan Pasimasunggu	Indeks Ketahanan Sosial Kecamatan Pasimasunggu			0,6900	0,7000	0,7100	0,7150	0,7150
			Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat	Tingkat solidaritas sosial di Kecamatan	69%	70%	71%	71,5%	71,5%
4	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan di Kecamatan Pasimasunggu	Indeks Kesalehan Sosial Kecamatan Pasimasunggu			63,00	65,15	67,30	70,00	75,00
			Meningkatnya toleransi Kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu	Tingkat toleransi di Kecamatan	63%	65%	67%	70%	75%

5	Mewujudkan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi			55	64	68	73	76
---	--------------------------------	----------------------------	--	--	----	----	----	----	----

b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayartahun 2025-2029 di dukung dengan 17 (tujuh belas) program prioritas sebagai berikut :

1. Membangun desa, menata kota

Membangun Desa merupakan lanjutan Program "Gerbang Sari" adalah upaya pembangunan ekonomi perdesaan dengan:

- a. Hulusasi SDA Berbasis Perwilayahan Komoditas; membagi wilayah sesuai potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan membentuk: Desa Nelayan, Desa Wisata, Desa Tani dan Desa Koperasi
- b. Hilirisasi SDA Berbasis UMKM, berasaskan "Petik – Olah – Jual" sebagai produk akhir untuk dipasarkan
- c. Pemasaran Produk UMKM Berbasis Teknologi Digital

Menata Kota adalah merupakan upaya pembangunan kawasan perkotaan dengan prioritas ibukota kabupaten dengan menata zona-zona peruntukan lahan, untuk mewujudkan kota tertib dan yaman, melalui kegiatan :

- a. Menata kawasan permukiman, dengan :
 - 1) Menyusun Rencana Induk Draisnase
 - 2) Menata pengelolaan limbah atau Peta jalan pengelolaan sampah
 - 3) Membangun sumur resapan yang berfungsi untuk menahan intrusi air laut ke lahan permukiman
- b. Menata kegiatan UMKM Perkotaan, dengan :
 - 1) Menata Sentra Kuliner, pelengkap destinasi wisata perkotaan (Septa Pesona)
 - 2) Membangun Sentra Ekonomi Kreatif (Pusat Karya Tanadoang) kerja sama dengan Dekranas Daerah
- c. Menata PSU Perkotaan, dengan :
 - 1) Menata jalur pantai Benteng
 - 2) Menata lapangan Pemuda menjadi alun-alun kota, yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau

- 3) Menata layanan sanitasi dan limbah perkotaan;
 - 4) Menata kembali jaringan drainase perkotaan;
 - 5) Melakukan reklamasi Pantai Bonea (dengan kajian LH) pada bagian dalam break water yang berfungsi sebagai Hutan Kota;
2. Kemandirian pangan, melalui peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dengan bantuan bibit, pupuk dan pestisida mendukung Program Ketahanan Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Pemerintah pusat;
 3. Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS, dengan program pengembangan dan penguatan terhadap pelaksanaan kesehatan gratis;
 4. Penguatan pendidikan gratis PAUD – PT, melalui program bantuan gratis kepada peserta didik pada satuan PUD sampai dengan SLTP berupa perlengkapan sekolah, serta bantuan hibah pendidikan bagi Pelajar dan Mahasiswa;
 5. Penguatan kesetaraan jender, PPA, dan penyandang disabilitas, dalam mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya, kesempatan kerja, ruang berpolitik dan memiliki hak kepemilikan yang sama;
 6. Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH, melalui program penataan kawasan permukiman dan penanganan rumah tidak layak sebagai upaya mengatasi stunting dan sebagian dari penyebab kemiskinan;
 7. Pengentasan kemiskinan, dengan program penanggulangan penduduk miskin berbasis data yang akurat;
 8. Penguatan fiskal daerah, melalui program peningkatan pendapatan daerah dan penggunaan dana secara efisien melalui pengelolaan yang efektif dengan hasil yang optimal;
 9. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah melalui program pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan kapasitas SDM untuk mengelola SDA sebagai produk ekonomi kreatif dan/atau inovasi;

10. Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM, melalui program pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan oleh UMKM dan masyarakat, untuk mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang akan memberi nilai tambah bagi masyarakat Petani dan Nelayan;
11. Hulusasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal, melalui program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan sebagai penyedia bahan baku pada hilirisasi;
12. Pemerataan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan UMKM, melalui program pengembangan usaha melalui penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan, seperti koperasi, UMKM, dan usaha perorangan dengan meningkatkan kemampuan SDM dan kemudahan akses permodalan;
13. Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan, melalui program pengembangan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara ke dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta penguatan empat pilar kebangsaan untuk meningkatkan toleransi antarsuku dan antaragama;
14. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan, melalui program pembangunan kebangsaan untuk meningkatkan perilaku toleransi masyarakat dalam beragama dan keberagaman suku, dalam rangka mewujudkan kedamaian dalam kehidupan masyarakat;
15. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umu, melalui program penyadaran dan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dalam rangka menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
16. Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga, melalui program penggalian dan pemeliharaan seni dan budaya untuk membangkitkan nilai-nilai yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan

masyarakat, dalam rangka menghidupkan kembali sifat kepedulian dan gotong-royong untuk membangun ekonomi kreatif, serta membina seni budaya, dan olah raga menjadi daya tarik wisata dan olah raga prestasi; dan

17. Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui program pemeliharaan dan pelestarian lingkungan dalam bentuk dokumen maupun fisik, untuk menjamin terjaganya sumber daya alam dan pembangunan yang berkelanjutan.



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Program Perangkat Daerah Kecamatan Pasimasunggu

a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD.

Program dan Kegiatan dimaksud hanya program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasimasunggu di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Perangkat Daerah
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Perangkat Daerah
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-Perangkat Daerah
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- Perangkat Daerah

- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
- g. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran Perangkat Daerah
- h. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - a) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- i. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - d) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- j. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
- k. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- l. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- m. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

UNSUR KEWILAYAHAN

2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan bagi aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk pendukung terlaksananya pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
 - a) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
 - a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah desanya. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

Kegiatan :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- b) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- c) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4) PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pasimasunggu. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya urusan pemerintahan secara umum yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pasimasunggu. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
 - a) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b) Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

c) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan fasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, baik dari segi pengelolaan pemerintahan, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, pembangunan kawasan, dan demikian pula dengan pula badan permusyawaratan desa. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - a) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - c) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - d) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - e) Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - f) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - g) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - h) Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 - i) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Tabel 4.1.1.
Program dan Kegiatan Investasi Pembangunan kabupaten Kepulauan Selayar (Usulan)

No	Program / Kegiatan	Volume	Tahun Pelaksanaan					Detail Lokasi	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029				
1	Pembangunan Jaring Diam Ramah Lingkungan (JADIRAL) / set net	1 km ²		2026				Desa Tanamalala	24 M	APBN	Kelengkapan Dokumen Perencanaan dokumen lingkungan kesiapan lahan dokumen terkait lainnya bagi program dan kegiatan fisik
2	Peningkatan produksi KOPRA; pelatihan dan pembuatan oven pemanggang	40 ton		2026	2027			Desa Maminasa	3 M	APBN / APBD Provinsi	
3	Pengawasan Wilayah Perbatasan		2025	2026	2027	2028	2029	Kecamatan Pasimasunggu	1 M	APBD Provinsi	
4	Pembinaan UMKM	50 org	2025	2026	2027	2028	2029	Kecamatan Pasimasunggu	2 M	APBD Provinsi / CSR	

b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tabel 4.1.2. T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pasimasunggu 2025-2029 Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)						
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)			
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Kecamatan Pasimasunggu				Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Pasimasunggu	33,89	55		64		68		73		76		76				
	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan pasimasunggu			Nilai Sakip Kecamatan Pasimasunggu	0	60		65		70		75		85		85				
				Laporan Keuangan Kecamatan Pasimasunggu sesuai SAP	0	sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasimasunggu	0	70		72,5		75		80		85		85		85		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	30	25	0	20	19,000,000	15	19,475,570	10	19,942,789	8	20,418,624	8	78,836,983	KECAMATAN PASIMAS UNGGU
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan (%)	100	100	0	100	8,000,000	100	8,000,000	100	8,000,000	99	8,000,000	100	32,000,000	KECAMATAN PASIMAS UNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	0	0	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	4	16,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	0	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	5	16,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan pemerintahan yang diselenggarakan (%)	100	100	0	100	4,000,000	100	3,468,752	100	4,000,000	100	4,000,000	95	15,468,752	KECAMATAN PASIMAS UNGGU
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	0	1	4,000,000	1	3,468,752	1	4,000,000	1	4,000,000	5	15,468,752	KECAMATAN PASIMAS UNGGU
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana	100	100	0	100	4,000,000	100	4,000,000	100	4,000,000	100	4,000,000	100	16,000,000	KECAMATAN PASIMAS UNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	0	0	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	4	16,000,000	KECAMATAN PASIMAS UNGGU
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	100	100	0	100	3,000,000	100	4,006,818	100	3,942,789	100	4,418,624	100	15,368,231	KECAMATAN PASIMAS UNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	0	0	1	1,000,000	1	2,006,818	1	1,174,912	1	1,846,105	4	6,027,835	KECAMATAN PASIMAS UNGGU
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0	0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,767,877	1	2,572,519	4	9,340,396	KECAMATAN PASIMAS UNGGU
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Capaian Kinerja	50,91	63,03	2,121,399,519	70,28	2,087,441,478	70,53	2,139,690,139	71,51	2,191,021,305	72,31	2,243,299,073	72,31	10,782,851,514	KECAMATAN PASIMAS UNGGU
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan	79,35	83		85		88		91		95		95		KECAMATAN PASIMAS UNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	99	14,000,000	100	14,000,000	100	14,000,000	100	16,500,000	100	16,500,006	100	75,000,006	KECAMATAN PASIMAS UNGGU
		0.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	1,500,000	2	1,500,000	2	1,500,000	2	2,000,000	3	2,000,000	11	8,500,000	KECAMATAN PASIMAS UNGGU
		0.00.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2,500,000	1	2,500,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	5	14,000,000	KECAMATAN PASIMAS UNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	3,000,000	1	3,000,006	5	13,500,006	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2,500,000	1	2,500,000	1	3,000,000	1	3,500,000	1	3,500,000	5	15,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,000,000	1	2,500,000	1	2,500,000	5	12,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,000,000	1	2,500,000	1	2,500,000	5	12,000,000	KECAMATAN PASIMAS UNGGU
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	100	1,691,372,895	100	1,625,671,634	100	1,629,429,851	100	1,630,412,417	100	1,635,147,791	100	8,212,034,588	KECAMATAN PASIMAS UNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15	15	1,687,872,895	15	1,621,171,634	15	1,619,929,851	15	1,625,912,417	15	1,631,647,791	75	8,186,534,588	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	5	7,500,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	500,000	1	1,000,000	1	2,000,000	1	1,000,000	1	500,000	5	5,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	0	0	1	500,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	500,000	4	3,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	1,500,000	4	1,500,000	4	5,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000	20	10,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah (%)	100	100	5,000,000	100	7,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	42,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	5	8,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	1,000,000	1	2,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	5	12,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	3,000,000	1	4,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	22,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi kepegawaian (%)	100	100	25,000,000	100	25,000,000	100	35,000,000	100	35,000,000	100	55,000,000	100	175,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
		0.00.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan (Paket)	1	1	15,000,000	0	0	0	0	0	0	1	20,000,000	2	35,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	0	0	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	4	10,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	0	0	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	4	10,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		0.00.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	10,000,000	1	20,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	5	120,000,000	KECAMATAN PASIMAS UNGGU	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perkantoran (%)	100	88,026,624	100	100,769,844	100	119,260,288	100	120,108,888	100	135,651,276	100	563,816,920	KECAMATAN PASIMAS UNGGU	
		0.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	1	700,000	1	700,000	1	700,000	1	700,000	4	2,800,000	KECAMATAN PASIMAS UNGGU	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)				Kondisi	
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		0.00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	2	7,000,000	2	7,000,000	2	7,000,000	2	7,000,000	8	28,000,000	KECAMATAN PASIMAS UNGGU	
		0.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	4,763,312	4	4,284,922	4	10,030,144	4	10,454,444	4	11,225,638	18	40,758,460	KECAMATAN PASIMAS UNGGU	
		0.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	4,763,312	2	4,284,922	2	10,030,144	2	10,454,444	2	11,225,638	10	40,758,460	KECAMATAN PASIMAS UNGGU	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4	3,500,000	4	3,500,000	4	4,500,000	4	4,500,000	4	4,500,000	20	20,500,000	KECAMATAN PASIMAS UNGGU
		0.00.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	4	8,000,000	KECAMATAN PASIMAS UNGGU
		0.00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	500	400	75,000,000	400	79,000,000	400	85,000,000	400	85,000,000	400	99,000,000	200	423,000,000	KECAMATAN PASIMAS UNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (%)	100	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	49,000,000	100	51,000,000	99	175,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	1	20,000,000	1	22,000,000	2	42,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	4,000,000	4	4,000,000	20	23,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	1	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	9	110,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang perkantoran (%)	100	100	205,000,000	100	220,500,000	100	225,500,000	100	244,500,000	100	250,000,000	100	1,145,500,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0	12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	48	10,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	0	0	12	8,000,000	12	8,000,000	12	8,000,000	12	8,000,000	48	32,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	205,000,000	12	210,000,000	12	215,000,000	12	234,000,000	12	239,500,000	60	1,103,500,000	KECAMATAN PASIMAS UNGGU
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100	100	68,000,000	100	69,500,000	100	81,500,000	100	85,500,000	100	90,000,000	100	394,500,000	KECAMATAN PASIMAS UNGGU
		0.00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	9	65,000,000	9	64,000,000	9	71,000,000	9	79,000,000	9	80,000,000	45	359,000,000	KECAMATAN PASIMAS UNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		0.00.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	0	0	2	2,500,000	6	7,500,000	4	3,500,000	4	5,000,000	16	18,500,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	3,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000	4	5,000,000	20	17,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan Pasimasunggu				Indeks Desa Membangun Kecamatan Pasimasunggu	0	0,6300		0,6650		0,7000		0,7150		0,7300		0,7300		
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa			Persentase Peningkatan Fungsi Lembaga Desa yang Dikoordinasikan	0	63		66		70		71		73		73		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	100	100	10,000,000	100	10,136,900	100	10,390,627	100	10,639,898	100	10,893,766	100	52,061,191	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan	100	100	10,000,000	100	10,136,900	100	10,390,627	100	10,639,898	100	10,893,766	100	52,061,191	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	3,000,000	7	2,500,000	7	2,500,000	7	2,500,000	7	3,000,000	35	13,500,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	1	3,500,000	1	3,500,000	1	3,500,000	1	3,500,000	1	4,000,000	5	18,000,000	KECAMATAN PASIMAS UNGGU
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	3,500,000	1	4,136,900	1	4,390,627	1	4,639,898	1	3,893,766	5	20,561,191	KECAMATAN PASIMAS UNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
Meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial di Kecamatan Pasimasunggu				Indeks Ketahanan Sosial Kecamatan Pasimasunggu	0	0,6900		0,7000		0,7100		0,7150		0,7150		0,7150		
	Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat			Tingkat solidaritas sosial di Kecamatan	0	69		70		71		71,5		71,5		71,5		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan	1	1	0	1	12,000,000	1	12,300,360	1	12,595,446	1	12,895,973	1	49,791,779	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)					
						(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	75	80	0	85	6,000,000	90	6,000,000	95	6,000,000	100	6,000,000	100	24,000,000	00	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	0	0	12	6,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	48	24,000,000	00	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (%)	100	100	0	100	6,000,000	100	6,300,360	100	6,595,446	100	6,895,973	100	25,791,779	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	0	0	12	6,000,000	12	6,300,360	12	6,595,446	12	6,895,973	48	25,791,779	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan di Kecamatan Pasimasunggu				Indeks Kesalehan Sosial Kecamatan Pasimasunggu	0	63	65,15	67,30	70	75	75							
	Meningkatnya toleransi Kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu			Tingkat toleransi di Kecamatan	0	63	65	67	70	75	75							
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan	0	0	30,000,000	0	30,410,700	0	31,171,880	0	31,919,693	0	32,681,297	0	156,183,570	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan (%)	75	80	30,000,000	84	30,410,700	90	31,171,880	95	31,919,693	100	32,681,297	100	156,183,570	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	300	300	25,000,000	300	24,890,480	300	25,687,499	300	26,488,082	300	27,284,987	1500	129,351,048	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	50	50	5,000,000	50	5,520,220	50	5,484,381	50	5,431,611	50	5,396,310	250	26,832,522	KECAMATAN PASIMASUNGGU
Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan Pasimasunggu				Indeks Desa Membangun Kecamatan Pasimasunggu	0	0,6300	2,161,399,519	0,6650	2,190,989,078	0,7000	2,245,829,536	0,7150	2,299,706,986	0,7300	2,354,577,994	0,7300	11,252,503,113	
	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa			Persentase Urusan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi	0	100	2,161,399,519	100	2,190,989,078	100	2,245,829,536	100	2,299,706,986	100	2,354,577,994	100	11,252,503,113	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan yang difasilitasi, direkomendasi, dikoordinasikan (%)	40	50	0	55	32,000,000	60	32,800,960	65	33,587,855	70	34,389,261	70	132,778,076	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	50	60	0	70	32,000,000	80	32,800,960	90	33,587,855	100	34,389,261	100	132,778,076	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	4	8,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	0	0	1	1,000,000	1	2,000,000	1	2,500,000	1	1,500,000	4	7,000,000	KECAMATAN PASIMAS UNGGU
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0	0	1	1,000,000	0	0	0	0	1	700,000	2	1,700,000	KECAMATAN PASIMAS UNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	0	0	1	1,500,000	1	2,000,000	1	2,500,000	1	1,500,000	4	7,500,000	KECAMATAN PASIMAS UNGGU
		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	1	0	0	1	7,500,000	1	6,800,960	1	5,587,855	1	6,689,261	4	26,578,076	KECAMATAN PASIMAS UNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	1	0	0	1	9,500,000	1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,000,000	4	41,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	0	0	1	9,500,000	1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,000,000	4	41,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
Total							2,161,399,519		2,190,989,078		2,245,829,536		2,299,706,986		2,354,577,994		11,252,503,113	

2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029, maka Kecamatan Pasimasunggu menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Pasimasunggu dengan Bupati dan Wakil Bupati, dan Kecamatan Pasimasunggu akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan.

Tabel 4.2.1. TC.28

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 (mengacu pada tujuan dan sasaran renstra)

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 2025	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	70%	72%	75%	80%	85%	85%
	Nilai SAKIP Kecamatan	60.2	60.2	65.2	70.2	75.5	80.0	80.0
	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	% Kebijakan Pembangunan seluruh urusan yang sinkron, harmonis, selaras maupun antar tingkat pemerintahan di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	%Penduduk yang mampu mengakses layanan seluruh urusan pemerintahan secara mudah, layak, dan terjangkau di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

b. Target Penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)

Tabel 4.2.2. TC.28

Indikator Kinerja Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 (tujuan dan sasaran RPJMD)

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 2025	Tahun 2 2026	Tahun 3 2027	Tahun 4 2028	Tahun 5 2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka Kemiskinan / Jumlah KK		15%					
2	Angka Pengangguran / Tenaga Kerja		30%					
3	Persentase Balita Gizi Buruk		0%					
4	Rata2 Jumlah Kelompok Binaan PKK		18					
5	Jumlah Klub Olah Raga		18					
6	Kepemilikan KTP		100%					
7	Ratio Pasangan Berakte Nikah		100%					
8	Kepemilikan Akte Kelahiran / 100 Penduduk		100%					
9	Cakupan Peserta KB Aktif / KK		65%					
10	Ratio Absektor KB Baru / KK		65%					
11	Jumlah Grup Kesenian		18					
12	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya		2					
13	Jumlah Organisasi Pemuda		18					
14	Persentase Penanganan Gangguan K3 Masyarakat		100%					
15	Jumlah Poskamling Perjumlah Desa/Kelurahan		18/6 Desa					
16	Angka Kriminalitas		1%					
17	Pembinaan Dan Fasilitasi Pemantauan Ormas Dan LSM		100%					
18	Penegakan Perda		100%					
19	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Perikanan		50%					
20	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan		50%					
21	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Pendidikan		70%					

22	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Pariwisata		50%					
23	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Pekerjaan Umum		80%					



BAB V

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Pasimasunggu sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka rencana strategis Kecamatan Pasimasunggu merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang direncanakan kurung tahun 2025 – 2029.

Visi Kecamatan Pasimasunggu sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2029, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan desa/kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Pasimasunggu. Rencana strategis Kecamatan Pasimasunggu akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tahun 2029 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu.

Pasimasunggu, Agustus 2025
Plt. Camat Pasimasunggu,

NUR AMIN, S.Sos.I
Nip. 198409032011011014